

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWAJIBAN  
BERJILBAB  
BAGI MAHASISWI MUSLIMAH  
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan**



**Disusun oleh :**

**RETNO SRI HANDAYANI  
NIM : 201510240211066**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Mei 2017**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWAJIBAN BERJILBAB  
BAGI MAHASISWI MUSLIMAH  
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**RETNO SRI HANDAYANI**  
**NIM : 201510240211066**

Telah disetujui  
Pada Hari/Tanggal, **Sabtu/ 22 April 2017**

Pembimbing Utama



**Dr. M. Svahri, M.Si**

Pembimbing Pendamping



**Dr. M. Agus Krisno Budiyanto, M.Kes**

Direktur  
Program Pascasarjana



**Alhisanul In'am, Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Kebijakan dan  
Pengembangan Pendidikan



**Dr. Agus Tinus, M.Pd**

# TESIS

**RETNO SRI HANDAYANI**

**NIM : 201510240211066**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada Hari/Tanggal, Sabtu / 17 April 2017  
dan dinyatakan sebagai syarat kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua / Penguji : Dr. M. Syahri, M.Si**

**Sekretaris / Penguji : Dr. M. Agus Krisno Budiyanto, M.Kes**

**Penguji : Dr. Agus Tinus, M.Pd**

**Penguji : Dr. Mahfud Effendi, MM**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **RETNO SRI HANDAYANI**

NIM : **201510240211066**

Program Studi : **Magister Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWAJIBAN BERJILBAB BAGI MAHASISWI MUSLIMAH DI UNWERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan,



**RETNO SRI HANDAYANI**



## ABSTRAK

Retno Sri Handayani. 2017. *Analisis Implementasi Kebijakan Kewajiban Berjilbab Bagi Mahasiswi Muslimah Di Universitas Muhammadiyah Malang*. Tesis, Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang.

Fenomena saat ini adalah adanya muslimah yang cenderung mengutamakan modernisasi dan globalisasi dibandingkan nilai-nilai syariat Islam dalam hal penampilan berpakaian termasuk mahasiswi UMM. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar di Jawa Timur, diberi amanat oleh PP Muhammadiyah sebagai perguruan tinggi pembina untuk seluruh PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) wilayah Indonesia timur. Dengan demikian, UMM dapat mempertahankan identitasnya sebagai amal usaha Muhammadiyah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar berlandaskan Al Qur'an dan hadits termasuk dalam menetapkan aturan-aturan berpakaian bagi mahasiswi muslimahnya. Membentuk potret idealisme peserta didik yang Islami sesuai cita-cita KH Ahmad Dahlan diperlukan sebuah strategi, salahsatunya melalui kebijakan. Di sini kebijakan sebagai *sebagai simbolisasi Islam bagi Universitas, sekaligus sebagai pendidikan karakter bagi mahasiswa*.

Kegiatan Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai strategi kebijakan berjilbab bagi mahasiswi muslimah di UMM dan implementasinya. Penelitian didesain menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun instrumen pendukung penelitian ini yaitu lembar wawancara, hasil observasi dan dokumen-dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan berjilbab di UMM bersifat *persuasif edukatif* (bersifat mengingatkan) melalui *pendekatan pembudayaan/kultural bertahap* berupa surat edaran Rektor himbauan kewajiban berjilbab saat Bulan Ramadhan dan kewajiban berjilbab saat moment-moment tertentu. Hasil penelitian kedua adalah bahwa persepsi para pembuat kebijakan tentang visi misi, dan pemaknaan tentang jilbab menjadi refleksi pemahaman visi misi, dan pemaknaan tentang jilbab di lingkungan mahasiswa dan lingkungan civitas akademika. Persepsi yang berkembang di lingkungan UMM bahwa "Menutup aurat hukumnya wajib, dan "jilbab" adalah kain penutup kepala hingga dada."

**Kata Kunci:** *Jilbab, Pendekatan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan*

## ABSTRACT

Retno Sri Handayani. 2017. *Implementation Analysis of Jilbab Obligation Policy for Muslimah College Students at the University of Muhammadiyah Malang*. Thesis, Master of Education Policy and Development, Postgraduate Program, University of Muhammadiyah Malang.

At the current phenomenon of Muslim women, there are those who tend to prioritize the modernization and globalization than the values of Islamic law in terms of the appearance of dress, including UMM student. University of Muhammadiyah Malang (UMM) is the largest Muhammadiyah college in East Java, entrusted by PP Muhammadiyah as the college coaches for the entire PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Muhammadiyah College) in the Eastern region of Indonesia. Therefore, UMM is expected to maintain their identity as the charitable efforts of Muhammadiyah to implement *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* based on Qur'an and Hadist including setting the dress rules for their Muslimah students. Forming a portrait of learners Islamic idealism corresponding with the ideals of KH Ahmad Dahlan needed a strategy, one of them through a policy. Policy not merely as an Islamic symbolism for the University, but also as a character education.

This research activities are conducted to obtain information about the policy strategy for the veiled Muslim students at UMM and its implementation. This research was designed using descriptive qualitative approach. As for the instruments supporting this research are questionnaires, observation, and documents. This study shows that the veiled policy in UMM is **persuasive educational** (to be reminded) using **acculturation / cultural stages** approach in the form of circular letter from the Rector, appeals about veiled obligations on the month of Ramadan and liabilities on certain moments. The results of the second study is that the perception of policy makers about the vision-mission, and the meaning of the veil to be reflective understanding of the vision-mission, and the meaning of the veil in the environment of students and academicians environment. A growing perception in UMM that "Close the genitalia is obligatory, and the "veil" is the cloth covering the head to the chest."

**Keywords:** *Jilbab, Policy Approach and Policy Implementation*

## KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAHIROBBIL AALAMIIN, ungkapan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan hidayah dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas penelitian tesis **“Analisis Implementasi Kebijakan Kewajiban Berjilbab Bagi Mahasiswi Muslimah Di Universitas Muhammadiyah Malang”** ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Melalui penelitian ini, penulis berharap bisa menambah pengetahuan tentang kewajiban berpakaian bagi muslimah yang sesuai dengan syariat Islam. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Malang dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Penulis menyadari selama penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Terimakasih dan penghargaan yang tinggi, penulis sampaikan kepada :

1. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dr. Agus Tinus, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Magister Kebijakan Pengembangan Pendidikan yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian tesis ini
3. Dr. M. Syahri, M.Si selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu membantu dan membimbing dalam penyelesaian tesis ini
4. Dr. M. Agus Krisno Budiyanto, M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu membantu dan membimbing dalam penyelesaian tesis ini
5. Segenap Civitas Akademika UMM, terimakasih atas kesempatan, informasi, bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini
6. Staf TU Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan yang telah membantu administrasi penyelesaian tesis ini.
7. Suamiku tercinta Arif Nurakhman, anak-anakku tersayang Diah, Abhi, Agha dan keluarga ku tercinta, terimakasih atas do'a, support, bantuan dan kesabarannya dalam mendampingi selama study hingga penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan MKPP 2015 atas keikhlasannya berbagi ilmu dan informasi selama penyelesaian tesis ini.

Semoga keikhlasan membimbing dan mendampingi penulis tersebut tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Syukron jazakumullah khoiron katsiro. Kami menyadari bahwa tesis ini tidak sempurna karenanya kami mengharap kritik dan saran membangun untuk memperbaiki tesis demi kesempurnaan tesis ini. Terimakasih kepada semua pihak. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kehidupan dan ilmu pengetahuan.

Malang, 16 Januari 2019

Penulis





## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul .....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing .....	ii
Lembar Dewan Penguji .....	Iii
Surat Pernyataan .....	iv
Abstrak .....	v
Abstrac .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Lampiran .....	xi
<b>1. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Landasan Teori</b> .....	<b>4</b>
2.1 Kebijakan .....	4
2.2 Kewajiban Berjilbab .....	8
<b>3. Metode Penelitian</b> .....	<b>14</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	14
3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian .....	15
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	15
3.4 Sumber dan Jenis Data .....	16
3.5 Teknik Analisis Data .....	16
3.6 Instrumen Penelitian .....	17
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	18
<b>4. Hasil Penelitian</b> .....	<b>19</b>
4.1 Kebijakan Kewajiban Berjilbab di UMM .....	19
4.2 Persepsi Civitas Akademika UMM tentang Kewajiban Berjilbab .....	20
4.3 Implementasi Kebijakan Berjilbab di UMM .....	22
<b>5. Pembahasan</b> .....	<b>31</b>
5.1 Persepsi Civitas Akademika UMM tentang Kewajiban Berjilbab .....	31
5.2 Implementasi Kebijakan Berjilbab di UMM .....	32
5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Berjilbab Di Universitas Muhammadiyah Malang .....	32

<b>6. Penutup .....</b>	<b>34</b>
6.1 Simpulan .....	34
6.2 Saran-Saran .....	35
<b>7. Rujukan .....</b>	<b>35</b>
<b>Lampiran-Lampiran .....</b>	<b>37</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Edaran tentang Penertiban Penampilan Mahasiswa .....	37
Studi Dokumentasi .....	38
Materi Keislaman dan Ibadah .....	39
Surat Edaran Rektor .....	41
Tata Tertib UPT. Program Pembentukan Kepribadian & Kepemimpinan.....	42



## 1. Pendahuluan

Penyimpangan terhadap budaya dan agama telah terjadi sejak era sebelum kemerdekaan Indonesia. Sekitar tahun 1906, masyarakat Indonesia dipenuhi dengan kehidupan *mistis*. Saat itu terjadi dualism pendidikan, yaitu sekolah Belanda yang sekuler dan pesantren yang hanya mengajarkan ajaran-ajaran agama saja. Sekulerisme berusaha ditancapkan kuat dalam pendidikan Indonesia di masa penjajahan Belanda. Islam berusaha dipisahkan dari semua aspek kehidupan terutama politik dan pendidikan.

Pada tahun 1868-1923 KH. Ahmad Dahlan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dengan model pendidikan integralistika. KH. Ahmad Dahlan mendirikan Organisasi Islam Muhammadiyah di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912. Gagasan pendirian Muhammadiyah ini adalah ingin mengadakan pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadis. (Basri, 2014). Melalui Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan berusaha mengintegrasikan pendidikan Agama Islam dan pendidikan umum di lembaga-lembaga pendidikan yang Beliau rintis.

A.R Fakhrudin menyatakan pada hakikatnya secara *normatif-konseptual*, identitas atau ciri khas Muhammadiyah dialamatkan pada gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan *tajdid* (Ali, 2016). Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utama Islam mengatur segala urusan kehidupan manusia di dunia. Pribadi beriman merupakan sebuah proses ketundukkan seseorang terhadap seluruh perintah Allah SWT yang dirumuskan di dalam Al-Qur'an dan Al Hadits. Berdasarkan hal ini, maka pendidikan agama harus bisa mewujudkan peserta didik menjadi muslim sempurna (*kaffah*). Dan sejak dini telah diberi pemahaman multikultural sosial agar tidak terjadi konflik di masa depan. (Arifin, 2012)

Substansi *kaffah* mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia termasuk hal berpakaian. Asumsi yang mulai mengakar di kalangan masyarakat saat ini “jilbab” adalah sebatas menutup kepala saja. Mahasiswa muslimah cenderung mengutamakan factor modernisasi dibandingkan nilai-nilai syar'i. Pakaian tersebut terasa memberinya kecantikan, kebanggaan, identitas, dan tetap menjadi suatu privasi untuknya. Pakaian bukan lagi sebagai kebutuhan pokoknya melainkan memandang pakaian lebih ke sesuatu yang emosional. (Arlin, 2012). “*Dressing is considered as the factor for*

*representing the social status of the person and many people of our culture and country believe in this view. Being in the fashion league, adopting the to-date fashion makes one look trendy and stylish,* artinya”Pakaian dianggap sebagai faktor untuk mewakili status sosial orang dan banyak orang dari budaya dan negara kita percaya pada pandangan ini. Dalam dunia fashion, mengadopsi mode to-date membuat individu terlihat trendi dan bergaya.” (Subhan, 2011)

Penolakan terhadap pemakaian jilbab syar’i umumnya akibat dari kekhawatiran akan keterbatasan yang mengiringi penggunaan jilbab. Misalnya pandangan bahwa jilbab syar’i membatasi gerak aktifitas, kuno dan merupakan tradisi Arab. Sementara itu, penerimaan penggunaan jilbab didukung adanya idola seperti tokoh perempuan yang berjilbab atau selebritis. Jilbab yang mereka pakai disebut kudung gaul, jilbab gaul, atau jilbab gaya selebritis. Mode jilbab yang dipadupadankan dengan jelana jins, kaos ketat, atau jilbab yang ditarik ke belakang dengan bentuk menyerupai punuk onta. Jilbab gaul, modis dan *stylish* ala *hijabers* telah membawa seperangkat nilai dan *trend* yang dilekatkan sebagai bagian dari gaya hidup mereka. (Novitasari, 2014)

Jilbab yang berkembang di akhir tahun-tahun ini cenderung mengikuti model yang sebenarnya dalam perspektif Islam telah menyimpang dari kaidah tentang menutup aurat secara benar. Bisa dikatakan benar, tentunya harus kembali pada kaidah-kaidah berjilbab yang ada dalam Al Qur’an dan sunnah. Penting memastikan bahwa pemahaman tentang hukum “wajib” berjilbab bagi muslimah dibuat berdasarkan kaidah syariat Islam, baik itu pemahaman secara tekstual maupun kontekstual. Bukan atas dasar tradisi dan interpretasi budaya semata. Disinilah diperlukan peran Syiar Islam sebagai perwujudan pendidikan Agama Islam untuk menyentuh *habitation* peserta didik. Syiar Islam untuk meningkatkan potensi spiritual peserta didik mencakup pengamalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan (Sahlan, 2010)

*Katalisator* pengembangan *habitation* membutuhkan sinergisitas intervensi Tri Pusat Pendidikan yaitu satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. *Habitation* tentu dapat memperkuat penyampaian pesan moral kepada diri sendiri dan masyarakat bahwa “saya adalah muslimah”. Upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam rangka pengembangan *habitation* tersebut dapat didukung oleh kebijakan, pedoman, sumber

daya, lingkungan, sarana-prasarana, kebersamaan, komitmen pemangku kepentingan, dan nilai-nilai luhur (termasuk peningkatan iman dan taqwa). Kuntowijoyo secara transparan menawarkan metode yang diyakini dapat mengarahkan terciptanya integritas antara ilmu agama dan ilmu umum atau sekurang-kurangnya dapat mempersempit jurang dikotomi antara keduanya itu. metode-metode itu menekankan pengajaran filsafat ilmu pada semua materi pengajarannya sebagai upaya memberikan background filosofis Islam. (Badaruddin, 2009)

Kebijakan bukan hanya simbolisasi Islam bagi Universitas, namun juga sebagai penyampai pesan moral kepada masyarakat sebagai usaha pendidikan karakter khususnya bagi peserta didiknya melalui habituation. Apabila hal tersebut dapat terlaksana secara optimal, maka akan terbentuklah perilaku berkarakter (Alami, 2013) Karakter adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak. (Kesuma, 2013) Kebijakan yang dibuat dalam menunjang pelaksanaan pendidikan karakter adalah: (a)kebijakan pendidikan karakter yang berkaitan dengan Tuhan; (b)kebijakan pendidikan karakter yang mengandung pesan moral dan kearifan lokal; (c)kebijakan pendidikan karakter yang berkaitan dengan nilai kebangsaan (Danang, 2015)

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai salahsatu bagian dari tri pusat pendidikan merupakan wujud “Amal Usaha Muhammadiyah” di bidang pendidikan. Anggaran dasar Muhammadiyah Bab II pasal 4 identitas dan azaz menyatakan “Muhammadiyah adalah gerakan Islam, da’wah amar ma’ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al Qur’an dan As Sunnah”. Bab III pasal 6 menyatakan “Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.” (Muhammadiyah, 2015)

UMM sebagai lokasi penelitian merupakan Perguruan Tinggi Pembina untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah di wilayah Indonesia Timur, UMM saat ini sudah terakreditasi A (Akreditasi dari BAN-PT No. 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013). Beberapa penghargaan juga sudah diraih UMM. (Fauzan, 2017). UMM diharapkan mampu mempertahankan identitasnya sebagai amal usaha Muhammadiyah, melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar berlandaskan Al Qur’an dan hadits sehingga dapat menjadi tolok ukur berkehidupan Islami bagi mahasiswa dan masyarakat.



Salah Satu penelitian terdahulu yang relevan adalah tesis yang disusun oleh Desi Erawati tahun 2009 tentang mahasiswa berjilbab di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang adalah “Fenomena Berjilbab di Kalangan Mahasiswa (Studi tentang Pemahaman, Motivasi, dan Pola Interaksi Sosial Mahasiswa Berjilbab di Universitas Muhammadiyah Malang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa jilbab adalah pakaian keseharian yang dapat menutup aurat dan melindungi mereka dari kejahatan lingkungan sekitar. Mereka berpandangan bahwa tindakan mereka yang tidak konsisten berjilbab dapat diganti atau ditebus dengan ibadah-ibadah lain atau amalan yang bersifat mu'amalah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi dan motivasi mahasiswa dalam berjilbab sangat beragam.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Analisis Implementasi Kebijakan Kewajiban Berjilbab Bagi Mahasiswa Muslimah Di Universitas Muhammadiyah Malang”. Fokus penelitian ini adalah; (1) Bagaimana kebijakan kewajiban berjilbab di UMM? (2) Bagaimana persepsi Civitas Akademika tentang kewajiban berjilbab? (3) Bagaimana implementasi kebijakan kewajiban berjilbab di UMM?

## **2. Landasan Teori**

### **2.1 Kebijakan**

#### **2.1.1 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah “Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan”. Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan (Imron, 2008)

Kebijakan di lingkungan universitas melibatkan interaksi dari beberapa pihak antara lain Rektor, Civitas Akademika UMM, dan komunitas yang dikenai kebijakan yaitu mahasiswa. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang nomor: 154 tahun 2006 Bab I Pasal 1 menyatakan “Rektor adalah pemimpin

dan penanggungjawab tertinggi tingkat Universitas Muhammadiyah Malang.” Hierarki kebijakan

### **2.1.2 Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. (Agustino, 2016). Wibawa menjelaskan bahwa kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen ini berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem managementnya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. komponen inilah yang disebut implementasi (Wisakti, 2008)

Pemaknaan para pembuat kebijakan terhadap suatu masalah sangat berpengaruh pada *kontent*/isi kebijakan. “Pemaknaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses/cara/perbuatan memberi makna/arti kepada suatu bentuk kebahasaan. Kaitannya dengan penelitian ini akan dikaji tentang persepsi pemaknaan para pembuat kebijakan UMM tentang kewajiban berjilbab bagi mahasiswa muslimah. Kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia, namun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan untuk suatu kebijakan (Solichin, 2015)

### **2.1.3 Kebijakan Dibangun Sebagai Strategi Syiar Islam**

Istilah “strategi” sangat familiar digunakan dalam bidang militer, namun kata strategi akhir-akhir ini telah diadopsi dan banyak digunakan dalam semua bidang termasuk pendidikan. Semakin hebat strategi yang digunakan (selain kekuatan pasukan perang), semakin besar kemungkinan untuk menang. Strategi digunakan untuk mengatur siasat agar dapat mencapai tujuan dengan baik. (Suyadi, 2015). Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi adalah perencanaan yang berisi angkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. (Aziz, 2015).

Sedangkan arti kata “Syiar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 kata *Syi* dan *Ar*, berarti kemuliaan atau kebesaran. Jadi Pengertian Syiar Islam adalah kemuliaan/kebesaran Islam. Syiar merupakan tindakan atau upaya untuk

menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal dalam Islam sebagai bukti kemuliaan/kebesaran Islam. Pendapat lain yaitu syiar berasal dari kata *syu'ur* yang bermakna *rasa*, karena syiar dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan keagungan Allah SWT. Syiar bisa diartikan juga menyampaikan kabar berita kepada orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.(Dunia Syiar Islam, 2014).

Syiar Islam menjadi alasan utama dalam menentukan kebijakan bagi perjuangan KH Ahmad Dahlan. Dari segi sosial mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam yaitu Muhammadiyah berupaya dalam pemberantasan bid'ah, khurafat dan takhayul. Dari segi pendidikan, Ahmad Dahlan mengkolaborasikan sistem pendidikan sekuler dengan pendidikan yang hanya mengajarkan agama saja. Sehingga terbentuklah sekolah agama dan pengetahuan umumpun tetap diajarkan menggunakan metode murid bertanya.(Arlen, 2014).

Dasar kewajiban Syiar Islam adalah untuk memberi peringatan antar manusia, agar manusia dapat mengambil pelajaran. Al Qur'an menyatakan:

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (QS Al Dzariyat :55)

“Demikianlah (perintah Allah) barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.”(QS Al Hajj :32)

Syiar islam ini tak lain adalah strategi yang bertujuan untuk mengarahkan mahasiswi muslimah agar memiliki tanggungjawab perdamaian di dunia dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana perintah Allah SWT untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang munkar.” (QS. Ali Imrom:110)

“ Katakanlah: Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah: 100)

Dari pengertian “strategi” dan “syiar Islam”, maka dapat disimpulkan pengertian strategi syiar Islam adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk bertindak dalam menyampaikan dan memperkenalkan kemuliaan/kebesaran Islam. kebijakan sebagai strategi syiar Islam khususnya di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

### 1) Strategi Dakwah

Kebijakan sebagai *point of power* pimpinan sangat besar pengaruhnya dalam membangun syiar Islam untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Kebijakan dapat disusun sebagai strategi dakwah. Strategi dakwah dalam Al Qur'an dapat ditemukan di surat al-Baqarah ayat 129 dan 151, surat Ali Imran ayat 164, dan al-Jumu'ah ayat 2. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan tiga strategi dakwah, yaitu:

#### (1) Strategi Tilawah (membacakan ayat-ayat Allah SWT)

Mitra dakwah diminta mendengarkan penjelasan pendakwah atau mitra dakwah membaca sendiri pesan yang ditulis oleh pendakwah. Strategi ini merupakan tranfer pesan dakwah dengan lisan dan tulisan. Strategi tilawah bergerak di ranah kognitif (pemikiran) yang transformasinya melewati indra pendengaran (al-sam') dan indra penglihatan (al-abshar) serta ditambah akal yang sehat (al-af'idah)

#### (2) Strategi Tazkiyah (mencusikan jiwa)

Strategi ini melalui aspek kejiwaan. Sasaran strategi ini adalah jiwa yang kotor. Kekotoran jiwa dapat menimbulkan berbagai masalah baik individu maupun sosial, baik penyakit hati maupun badan. Salah satu misi dakwah adalah mensucikan jiwa manusia.

#### (3) Strategi Ta'lim (mengajarkan Al Qur'an dan al hikmah (kebijaksanaan))

Strategi ini mentransformasikan pesan dakwah lebih mendalam dibandingkan strategi tilawah. Artinya, metode ini hanya dapat diterapkan pada mitra dakwah yang tetap, dengan kurikulum yang telah dirancang, dilakukan secara bertahap, serta memiliki target dan tujuan tertentu. (Aziz, 2015)

### 2) Mengadopsi Strategi Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah

Budaya (*culture*) memiliki peran penting dalam membangun keimanan dan ketaqwaan baik itu di lembaga sekolah, universitas maupun lembaga pemerintah dan swasta. Lembaga pendidikan sebagai *agen of change*, pencetak generasi muda penerus masa depan bangsa memiliki tugas dan tanggungjawab menyampaikan pendidikan karakter berbasis iman dan taqwa bagi para peserta didik. Pendidikan karakter berbasis iman dan taqwa ini merupakan pengembangan pendidikan agama islam dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang saling terintegrasi dengan nilai-nilai Agama islam sehingga terwujud budaya religius.

Budaya religius di lembaga pendidikan merupakan cara berpikir dan cara bertindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius. Religius menurut Islam adalah menjalankan ajaran agama secara menyeluruh (kaffah) sebagaimana firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”(QS. Al-Baqarah: 208) (Sahlan, 2010)

Lebih terperinci, Muhaimin menjabarkan metode pengembangan pendidikan Islam mewujudkan budaya religius sekolah dapat dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu :

- (1) Pendekatan Struktural. Yaitu strategi pengembangan dalam mewujudkan budaya religius sekolah sudah menjadi komitmen dan kebijakan pimpinan sekolah. Pendekatan ini lebih bersifat “*top down*”.
- (2) Pendekatan formal, yaitu strategi pengembangan budaya religius sekolah dilakukan melalui pengoptimalan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah.
- (3) Pendekatan Mekanik, yaitu strategi pengembangan budaya religius sekolah didasari oleh pemahaman bahwa kehidupan terdiri dari berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan.
- (4) Pendekatan Organik, yaitu penciptaan suasana religius yang disemangati oleh pandangan bahwa pendidikan agama adalah kesatuan/suatu sistem sekolah yang berusaha mengembangkan semangat hidup agamis.(Sahlan,2010)

## **2.2 Kewajiban Berjilbab**

### **2.2.1 Kewajiban**

Kamus Besar bahasa Indonesia menyatakan “kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan”. Melaksanakan kewajiban menutup aurat dalam Islam sebagai wujud syukur kita kepada-Nya. Bahwa Allah SWT berfirman sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian taqwa:

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah –mudahan mereka selalu ingat.” (QS.Al – A“raf: 26).

Berpakaian sesuai syariat al Qur'an dan sunnah merupakan salah satu refleksi dari pakaian taqwa. Artinya alasan terbaik dalam berpakaian adalah sebagai manifestasi ketaqwaan kita kepada Allah SWT, bukan untuk tujuan yang lain seperti mempertontonkan kecantikan (*tabarruj*) untuk mengundang perhatian orang lain khususnya laki-laki *ajnabi/non mahrom*

### 2.2.2 Larangan dalam Berpakaian Wanita Muslimah

Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Ada dua golongan (dari umatku) yang akan masuk neraka, Sekelompok orang yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia. Dan wanita-wanita yang berpakaian namun seperti telanjang, genit dan melenggang-lenggangkan kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak bisa masuk surga, bahkan mencium aromanya pun tidak. Padahal, aroma surga bisa dicium dari kejauhan perjalanan tertentu (perjalanan lima ratus tahun)”(HR. Muslim).

“Dari Ikrimah dan Ibnu Abas ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki.” (HR.Bukhari)

Dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita, siapapun dia, jika dia (keluar rumah dengan) memakai wangi-wangian, lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium wanginya maka wanita itu adalah seorang pezina.” (HR an-Nasa'i, HR Ahmad, HR Al-Hakim)

“Barangsiapa mengenakan pakaian *syuhrah* di dunia maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat (nant) kemudian dinyalakan padanya api neraka.” (HR Abu Dawud dan HR Ibnu Majah)

Beberapa hadits di atas menjelaskan larangan dalam berpakaian bagi wanita muslimah antara lain; wanita berpakaian namun hakekatnya telanjang (menampakkan lekuk tubuh), memakai kerudung mode punuk onta, tasyabbuh/menyerupai laki-laki, memakai wewangian, memakai pakaian mewah yang ditujukan agar dikagumi/*syuhrah* dan pamer kecantikan/*tabarru*. Hal tersebut banyak kita jumpai saat ini. Wanita



berpakaian tapi telanjang misalnya wanita berkerudung tapi pakaiannya ketat semacam celana jins yang dapat dilihat jelas lekuk-lekuk tubuhnya, wanita yang mengenakan pakaian hanya menutup sebagian tubuh (sementara auratnya tetap terbuka), wanita yang memakai pakaian teramat tipis, hingga kulit tubuhnya kelihatan jelas, yang demikian itu dikatakan mengenakan pakaian, namun pada hakikatnya tetap telanjang. (Al-Hawani, 1995).

### **2.2.3 Batasan Aurat Wanita**

Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya mulai ujung rambut hingga ujung kaki selain wajah dan telapak tangan. Hal ini dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW:

“Aisyah meriwayatkan, bahwa saudaranya yaitu Asma’ binti Abu Bakar pernah masuk di rumah Nabi dengan berpakaian jarang sehingga tampak kulitnya, kemudian beliau berpaling dan mengatakan “Hai Asma’ sesungguhnya seorang perempuan apabila telah datang waktu haidh tidak patut diperlihatkan tubuhnya melainkan ini dan ini-sambil Ia menunjuk muka dan tapak tangannya.” (HR Abu Daud) (Hadits, 2013)

“Rasulullah melarang wanita yang sedang ihrom memakai qofas (sarung tangan) dan niqob (tutup muka).” (HR Bukhari) (Hadits, 2013)

### **2.2.4 Hijab dan Kerudung (*Khimar*)**

Mayoritas masyarakat berasumsi bahwa hijab dan kerudung adalah dua hal yang sama padahal berbeda. Istilah hijab kita temui di Al Qur'an surat QS Al Ahzab ayat 53 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kalian diijinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kalian diundang maka masuklah dan jika kalian selesai makan maka keluarlah kalian tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepada kalian (untuk menyuruh kalian keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang *hijab*. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Dan tidak boleh kalian menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya

sesudah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah.” (QS. Al-Ahzab:53)

Jadi “hijab” dideskripsikan sebagai kain yang menutupi/membatasi seorang wanita jika bertemu dengan laki-laki lain yang bukan mahromnya. Jadi hijab secara tekstual menurut Al Qur’an mengandung pengertian umum yaitu kain tabir yang menutupi. Sedangkan pengertian khimar terdapat dalam QS An Nur ayat 31, yang artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup *khumur* ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita...” (QS. An-Nur : 31. Belajar Al Qur’an dan Hadits, 2013)

Ayat di atas menjelaskan bahwa khumur (plural dari khimar) digunakan hingga menutup dada. Jadi yang dimaksud *khimar* bukanlah hijab melainkan kerudung. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud “khimar” adalah apa-apa yang digunakan untuk menutupi kepala (maa yughaththa bihi ar ras’su) (Al Jawi, 2016).

### 2.2.5 Jilbab

Jilbab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerudung lebar yang dipakai muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Pengertian ini yang berkembang di masyarakat Indonesia bahwa jilbab dan kerudung adalah dua hal yang sama.

Kita akan tahu hukum suatu permasalahan, jika kita mengetahui maksud dan bentuk kongkrit permasalahan tersebut berdasarkan perspektif syara’ (agama). Maka

untuk mengetahui hukum memakai jilbab, terlebih dahulu kita harus memahami secara tekstual maupun kontekstual apa itu jilbab yang dimaksud dalam Al Qur'an. Kewajiban berjilbab dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 59, yang artinya:

“Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan **jilbabnya** ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”

Pengertian jilbab jika ditinjau dari segi bahasa Arab, berasal dari akar kata *jalaba*, berarti menghimpun dan membawa. Bentuk jamaknya adalah *jalabib*, mempunyai arti sesuatu (kain) atau pakaian longgar yang digunakan untuk menutupi seluruh badan perempuan. Quraish Shihab berpendapat bahwa jilbab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung (sebagai) penutup kepala (outer garments atau juga mantle dan cloak). Di wilayah Arab dikenal pakaian yang disebut Jalabiyah; Gallabeyyah (Mesir); Jellabah (Maroko) dan pakaian jenis ini di kawasan Indonesia dikenal sebagai Jubah. (Daud, 2013)

Imam Al Qurthubi menafsirkan jilbab yakni “Kata jalaabiib adalah bentuk jamak dari jilbab, yaitu baju yang lebih besar ukurannya daripada kerudung (akbar min al khimar). Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa jilbab artinya adalah *ar ridaa'* (pakaian sejenis jubah/gamis). Ada yang berpendapat jilbab adalah *al qinaa'* (kudung kepala wanita atau cadar). Pendapat yang sah, jilbab itu adalah baju yang menutupi seluruh tubuh (*al tsaub alladzy yasturu jamii' al badan*).” (Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, 14/107) (Al Jawi, 2016). Penjelasan tentang perbedaan pengertian antara hijab, khimar dan jilbab ini bertujuan untuk mengembalikan pemahaman tentang pengertian ketiganya berdasarkan Al Qur'an dan hadits di tengah masyarakat.

### 2.2.6 Jilbab Syar'i

Jilbab yang Syar'i menurut Program Pembentukan Kepribadian & Kepemimpinan (P2KK) UMM dalam bukunya berjudul “Materi Ke-Islaman dan Ibadah” dalam Bab tentang fikih wanita tentang thaharah dan tabarruj terdapat pembahasan bahwa makna jilbab adalah “ Dalam arti asli bahwa jilbab adalah baju

gombrong yang dapat menutup seluruh tubuh” sesuai dengan Firman Allah SWT QS. Al Ahzab:59.

Berjilbab Syar’i memiliki kriteria sebagai berikut:

- (1) Menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan yaitu wajah dan telapak tangan/ berjilbab (QS. An Nur:31)
  - (2) Tidak merupakan pakaian perhiasan yang menarik perhatian atau tabarruj/pamer kecantikan kepada laki-laki bukan mahrom (QS Al Ahzab:33)
  - (3) Kain tebal, tidak tipis dan tembus pandang
  - (4) Jilbab itu lebar/tidak ketat
  - (5) Tidak diberi wangi-wangian/parfum yang baunya dicium oleh laki-laki bukan mahrom
  - (6) Tidak menyerupai pakaian laki-laki
  - (7) Tidak menyerupai mode/pakaian wanita fasik/musyrik
- Bukan pakaian mencari popularitas/ketenaran karena mewah atau zuhud (Hadrami,2017)



Gb Ilustrasi wanita berjilbab syar’i berdasarkan perspektif Al Qur’an (Al Jawi, 2016)

### 2.2.7 Grand Teori

Teori dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai pisau analisa untuk menganalisis tema penelitian. Peneliti menggunakan landasan teori makna Jilbab menurut Syara' (agama) berdasarkan tafsir Imam Al Qurthubi mengenai "jilbab" dalam QS. Al Ahzab ayat 59 bahwa pendapat yang shohih tentang pengertian jilbab bukanlah kerudung atau cadar, melainkan "jilbab adalah baju yang menutupi seluruh tubuh" (al tsaub alladzy yasturu jamii'al al badan) yang tercantum dalam Tafsir Al Qurthubi 14/107. (Al Jawi, 2016). Tafsir ini akan digunakan sebagai dasar menganalisis tentang persepsi civitas akademika UMM tentang kewajiban berjilbab

Teori ke dua yang peneliti gunakan adalah teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III yaitu model implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect impact on implementation*. Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu;

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi (Agustino, 2016)

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis tentang kebijakan dan implementasi kebijakan kewajiban berjilbab bagi mahasiswa muslimah UMM

## 3 Metode Penelitian

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2011)

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Biklen seperti yang dikutip oleh Sugiyono, antara lain :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk/*outcome*
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Lebih menekankan makna (data dibalik yang diamati) (Sugiyono, 2015)

### 3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang yang berlokasi di Jln. Raya Tlogomas No. 246 Tlogomas, Lowokwaru, Tegalondo Karangploso Kota Malang Jatim didasari pada pertimbangan bahwa UMM adalah Perguruan Tinggi Pembina untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah di wilayah Indonesia Timur, UMM saat ini sudah terakreditasi A (Akreditasi dari BAN-PT No. 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013). Beberapa penghargaan sudah diraih UMM. UMM merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar di Jawa Timur. Kampus putih ini diberi amanat oleh PP Muhammadiyah sebagai perguruan tinggi pembina untuk seluruh PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) wilayah Indonesia timur (Wikipedia, 2015)

Subjek penelitian ditentukan dengan pertimbangan :

1. Muslim
2. Civitas akademika UMM yang memiliki tupoksi berkaitan dengan kebijakan berjilbab di UMM
3. Para pelaku kebijakan yaitu mahasiswa yang ditemui saat observasi

Subjek penelitian sebagai sumber data dalam penelitian ini antara lain: Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Kepala Biro Kemahasiswaan, Kepala urusan kemahasiswaan, Askorbid AIKA, Kepala Bagian Pengajaran AIKA dan MKDU, Koordinator P2KK, Mahasiswa UMM (tujuh mahasiswi muslimah dan satu mahasiswa muslim), dan dua satpam.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode: 1). Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu *interviewer* dan *interviewee*. 2). Observasi dilakukan karena penelitian berkaitan dengan perilaku manusia 3). Dokumentasi, merupakan kegiatan mencari data yang berupa benda-benda tertulis seperti buku, peraturan-peraturan, foto dan sebagainya (Arikunto, 2013).

Proses wawancara dilakukan di lingkungan UMM mulai Bulan November 2016 sampai Bulan Februari 2017. Informan wawancara untuk mendapatkan data berupa persepsi makan jilbab, kebijakan kewajiban berjilbab dan implementasinya. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dokumen tertulis yang resmi maupun tidak resmi yang dikeluarkan UMM. Data dokumen ini berupa buku-buku panduan, surat edaran, pengumuman, dan tata tertib.



### 3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata lisan, tulisan tindakan, dokumentasi dan lain-lain. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Moleong, 2015). Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Subjek penelitian. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen berupa foto, arsip, dan catatan bagian tata usaha. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

1. Surat edaran Rektor UMM tentang penertiban penampilan mahasiswa di dalam buku Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan oleh Biro Kemahasiswaan.
2. Buku Materi KeIslaman dan Ibadah
3. Buku Kurikulum Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah
4. Modul Penyusunan SPMI PTM
5. Surat edaran Rektor tentang hal-hal yang harus dilakukan saat Bulan Ramadhan
6. Tata tertib peserta P2KK
7. Foto-foto mengenai pertemuan peneliti dengan subjek penelitian
8. Foto-foto mengenai himbauan-himbauan tentang aturan berpakaian di kampus UMM

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data selama di lapangan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif deskriptif model Miles and Huberman. Model ini mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas/tahapan-tahapan dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2015)

Tahapan-tahapan analisis data menurut teori data model Miles and Huberman dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Reduksi data berarti merangkum informasi dengan melakukan pengurangan data yang tidak perlu. Reduksi data difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu tentang bagaimana persepsi para pembuat kebijakan UMM dan mahasiswi muslimah tentang kewajiban berjilbab bagi mahasiswi muslimah. Serta bagaimana kebijakan dan implementasinya. Dalam mereduksi data peneliti mengacu pada tujuan penelitian yang ingin dicapai

- 2) Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan hubungan antar kategori yang disajikan dalam bentuk verbatim. Setelah dilakukan reduksi data maka data disajikan menggunakan uraian deskriptif untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi data.
- 3) Kesimpulan dan Verifikasi data, tahap ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. (Sugiyono, 2015)

### **3.6 Instrumen Penelitian**

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Jadi Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Sugiyono, 2015). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah daftar pertanyaan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mendeskripsikan makna tentang jilbab, dan data mengenai implementasi kebijakan berjilbab di UMM. Observasi adalah pengamatan di lapangan secara cermat. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data di lapangan sebagai penunjang hasil wawancara. Studi dokumen adalah mempelajari dan mendokumentasikan arsip. Studi dokumentasi untuk memperoleh bukti otentik yang menunjang hasil wawancara. Kisi-kisi wawancara dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Wawancara dengan Sivitas Akademika UMM**

- 1) Menurut Bapak/Ibu bagaimana visi misi UMM?
- 2) Apa yang menjadi karakteristik UMM?
- 3) Apakah ada kebijakan/regulasi hukum aturan berpakaian bagi mahasiswa muslimah khususnya berjilbab di UMM?
- 4) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi berjilbab di kampus?
- 5) Apakah ada sanksi berkaitan dengan penggunaan jilbab?
- 6) Melihat fenomena sekarang, banyak mahasiswa UMM berpakaian yang masih membentuk lekuk tubuh padahal telah dilarang, apa yang menjadi penyebab hal tersebut?
- 7) Bagaimana persepsi Bapak/Ibu tentang makna jilbab?
- 8) Adakah manfaat berpakaian syar'i menurut Bapak/Ibu?

- 9) Derajat perubahan apa yang hendak dicapai dengan adanya kebijakan berpakaian khususnya berjilbab bagi mahasiswa?
- 10) Dalam Al Qur'an surat Al A'raf ayat 26 menyatakan bahwa Allah SWT menurunkan pakaian untuk menutup aurat dan pakaian taqwa adalah yang paling baik. Menurut Bapak/Ibu apakah ada hubungannya dengan surat Al Ahzab ayat 59 tentang perintah berjilbab?
- 11) Berdasarkan Al Qur'an surat Al Hajj ayat 32 ada himbauan Allah SWT untuk melakukan syiar Islam. Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika kebijakandibangun sebagai sarana syiar Islam khususnya mensosialisasikan kewajiban berjilbab?

## **2. Wawancara Dengan Mahasiswi Mulimah dan Satpam**

- (1) Menurut Mbak/Bapak bagaimana visi misi UMM?
- (2) Apa yang menjadi karakteristik UMM?
- (3) Apakah ada kebijakan/regulasi hukum aturan berpakaian bagi mahasiswi muslimah khususnya berjilbab di UMM?
- (4) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi berjilbab di kampus?
- (5) Apakah ada sanksi berkaitan dengan penggunaan jilbab?
- (6) Sejak kapan berjilbab dan alasan berjilbab?
- (7) Apa manfaat berjilbab bagi Mbak?
- (8) Apa makna jilbab menurut Mbak?
- (9) Apa tujuan berjilbab?
- (10) Menurut Mbak apa alasan muslimah tidak berjilbab?
- (11) Apakah ada harapan untuk UMM berkaitan dengan aturan berjilbab?

### **3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data dengan metode triangulasi data. Triangulasi data adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2015). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2012)

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan mencantumkan asal sumber data. Triangulasi dilakukan peneliti sebagai upaya untuk

membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, atau dokumen hasil observasi dengan hasil wawancara, maupun dengan membandingkan hasil wawancara subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lainnya.

#### **4. Hasil Penelitian**

##### **4.1 Kebijakan Kewajiban Berjilbab di UMM**

Aturan kedisiplinan berpakaian di UMM tertuang dalam buku “Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan” oleh Biro Kemahasiswaan. Buku ini berfungsi sebagai legalitas formal kebijakan. Di dalam buku pedoman ini tercantum Surat Edaran Rektor No. E.5.a/1003/UMM/X/2007 tentang “Penertiban Penampilan Mahasiswa”. Buku pedoman tersebut berisi aturan penampilan mahasiswa secara umum, tidak ada aturan tentang pakaian mahasiswi muslimah khususnya jilbab syar’i.

Pada dasarnya sejak awal kebijakan UMM dibangun sebagai sarana syiar Islam. Hal ini dijelaskan oleh informan :

Dari sejak awal UMM dibentuk untuk itu jadi dosen itu pendidik bukan pengajar. Mendidik itu yang syarat yang paling berat adalah memberikan nilai-nilai pendidikan, nilai religius, nilai teologis kalo mengajar pengetahuan-pengetahuan. Nah, bagaimana pemahaman mendidik dipahami oleh para dosen.” (WAR3-8/12/2016)

UMM memiliki strategi tersendiri dalam membangun kebijakan sebagai sarana syiar Islam terutama sosialisasi kewajiban berjilbab di kalangan mahasiswa. Hal ini dijelaskan oleh salahsatu informan:

Pengandaian oleh pimpinan, andaikan diterapkan diwajibkan dalam bentuk pendekatannya legal formal, nanti harus dibuat aturan, peraturan itu harus ditaati dan evaluasinya harus terjadi. Untuk di sini, kemaren dan saat ini dirasa kurang tepat. Pendekatan kultural itulah yang akhirnya dipilih. (DIR/A-17/01/2017)

Askorbid AIKA menjelaskan bahwa sosialisasi kewajiban berjilbab di UMM menggunakan pendekatan kultural yang memiliki beberapa tahap yaitu:

- 1) Ada penjelasan tentang kewajiban muslimah di moment-moment tertentu
- 2) Ada himbauan dalam bentuk edaran menjelang Bulan Ramadhan
- 3) Ada teguran dari pimpinan bagi karyawan dari dosen, ada teguran dari dosen AIKA bagi mahasiswi muslimah yang mengikuti kuliah tidak berjilbab

Berdasarkan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan UMM mensosialisasikan kewajiban berjilbab bagi mahasiswi muslimah dilakukan

secara *persuasif edukatif* (bersifat mendidik dan mengingatkan) melalui *pendekatan pembudayaan/kultural*

#### 4.2 Persepsi Civitas Akademika UMM tentang Kewajiban Berjilbab

Kata “makna” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah arti; pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. sehingga pengertian “pemaknaan” adalah suatu poses/cara/perbuatan memberi makna/arti kepada suatu bentuk kebahasaan.(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Di kurikulum mata kuliah AIKA belum ada bab khusus tentang pembahasan pemaknaan jilbab syar’i sesuai dengan ketentuan syara’ (agama). Sementara itu di Modul penyusunan SPMI PTM terdapat standart AIKA aspek Sumber Daya Manusia, salahsatunya memiliki indikator “Kompetensi Personal” point (f) Dosen menggunakan busana muslim/muslimah. Namun belum tercantum standart busana muslim/muslimah tersebut, demikian pula di Biro kemahasiswaan belum ada ketentuan aturan standard tentang jilbab/pakaian muslimah. Istilah “busana muslimah atau pakaian Islami” lebih dipilih untuk digunakan dibandingkan “jilbab”. Hal ini karena adanya persepsi bahwa jilbab adalah bagian dari pakaian Islami/pakaian muslimah. Tidak ada ketentuan formal tentang bentuk dan ukuran pakaian muslimah tersebut.

Mode dan ukuran jilbab sesuai selera pemakainya. Hal ini dilakukan agar timbul rasa nyaman saat mengenakan jilbab tersebut, seperti yang disampaikan para informan

Jilbab adalah kain kerudung penutup kepala dan menutupi bagian tubuh di bawah kepala (dada)” **(KO/P/U-12-22/11/2016)**

Menutup aurat baik laki-laki, perempuan itu wajib. Tapi UMM tidak bisa kemudian punya kebijakan semua mahasiswa UMM wajib berjilbab, Itu bergantung pada persepsi masing-masing. Kewajiban utamanya menutup aurat, seperti apa menutup aurat tidak ada standar tunggal. Misalnya boleh gak memakai celana? *why not*. Sejauh celananya itu longgar, asalkan di tempat yang tepat.**(WAR1-10-8/12/2016)**

Jilbab di UMM yang menutupi kepala dan bagian-bagian tertentu yang dibawah kepala tetapi tidak menetapkan ukuran, ada yang panjang dan ada yang tidak panjang. jilbab itu sejauh ini UMM tidak mngeluarkan ukuran.**(DIR/A-11-17/01/2017)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Civitas Akademika UMM memiliki persamaan persepsi tentang makna jilbab bahwa jilbab adalah kain penutup kepala hingga dada (bagian tubuh wanita dibawah kepala yang wajib ditutupi) yang dikenakan sebagai upaya menjalankan perintah Allah SWT untuk

menutup aurat. Jilbab adalah bagian dari substansi pakaian taqwa yang dimaksud dalam Al Qur'an surat Al A'raf ayat 26.

Persepsi di atas sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswi UMM, dosen, karyawan telah mengenakan kerudung yang dimaknai sebagai jilbab dengan menggunakan berbagai jenis pakaian termasuk celana jins. Hasil wawancara dengan satpam dan mahasiswi muslimah :

Jilbab adalah kerudung penutup kepala hingga dada. Hukum jilbab itu wajib. Kriteria jilbab itu relatif. alasannya bermacam-macam. (S/R-14-26/11/2016)  
Hukum mengenakan jilbab adalah wajib, jilbab adalah mengulurkan kain dari kepala, menutupi leher dan dada. (MS1/E-15-20/02/2017)

Persepsi Civitas Akademika UMM tentang makna jilbab ini tidak sesuai dengan grand teori peneliti yaitu tafsir Imam Al Qurthubi mengenai "jilbab" dalam QS. Al Ahzab ayat 59 bahwa pendapat yang shohih tentang pengertian jilbab bukanlah kerudung atau cadar, melainkan "jilbab adalah baju yang menutupi seluruh tubuh" (al tsaub alladzy yasturu jamii' al al badan) yang tercantum dalam Tafsir Al Qurthubi 14/107.

Sementara itu, ada persepsi berbeda dari salah satu informan tentang makna jilbab yaitu:

Satu tuntunan Islam berbusana menutup aurat. Jilbab itu semuanya menutup aurat, bukan hanya menutup kepala tapi keseluruhan badan..”(KABi/K-13-8/12/2016)

Ternyata pendapat inilah yang sesuai dengan studi dokumen di P2KK. Buku berjudul **“Materi ke-Islaman dan Ibadah” P2KK** yang menjadi buku rujukan mahasiswa dan Dosen P2KK, tercantum bab tentang fikih wanita yang berisi tentang thaharah dan tabarruj. Di sini dibahas tentang **makna jilbab yaitu “Dalam arti asli bahwa jilbab adalah baju gombong yang dapat menutup seluruh tubuh.”** sebagaimana firman Allah SWT QS AL Ahzab: 59.

Perbedaan persepsi tentang makna jilbab di kalangan civitas akademika UMM menjadi refleksi perbedaan persepsi pula di kalangan mahasiswa UMM tentang makna jilbab. Meskipun perbedaan tersebut kuantitasnya sangat kecil, persepsi mayoritas civitas akademika akan mempengaruhi persepsi mayoritas mahasiswa pula. Hal ini relevan dengan hasil penelitian tesis oleh Desi Erawati tahun 2009 tentang fenomena berjilbab di kalangan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang menunjukkan



bahwa persepsi dan motivasi mahasiswi dalam berjilbab sangat beragam. Perbedaan persepsi yang ada adalah sebuah kewajiban. Askorbid AIKA menyampaikan bahwa :

Di Muhammadiyah ada khilafiyah/perbedaan. Tentang jenis, bentuk, dan tentang panjang pendeknya jilbab tidak ditentukan(**DIR/A-14-17/01/2017**)

Allah SWT berfirman “Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.” (QS. an-Nisa:59).

#### **4.3 Implementasi Kebijakan Berjilbab Di UMM**

##### **4.3.1 Tahap Pelaksanaan**

Implementasi Kebijakan kewajiban berjilbab di UMM berupa surat edaran Rektor tentang himbauan berjilbab saat Bulan Ramadhan dan kewajiban berjilbab saat moment-moment tertentu. Moment-moment tertentu yang biasa digunakan untuk mensosialisasikan kewajiban berjilbab adalah PESMABA S1, training P2KK S1, dan pembelajaran mata kuliah AIKA 1,2,3,4 bagi S1. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan :

Edaran yang dikeluarkan menjelang moment tertentu seperti menjelang Romadhon, baitul arkom' kegiatan kaderisasi di Aisyiah. Menyangkut jilbab itu dengan pendekatan budaya pembudayaan pembiasaan dan mencontohi.” (**DIR/A-26-17/01/2017**)

Sejak awal kita menjelaskan pada orangtua, pertemuan wali mahasiswa, P2KK, spanduk, pas maba.” (**WAR1-24-8/12/2016**)

Peneliti menemukan data dari hasil observasi menunjukkan data yang sama. Beberapa mahasiswi UMM menginformasikan bahwa sosialisasi kewajiban berjilbab hanya di moment-moment tertentu saja khususnya di Bulan Ramadhan. Sementara itu hasil observasi pada tanggal 17 Februari 2017 menunjukkan bahwa UPT P2KK memiliki perencanaan aturan berpakaian bagi mahasiswi muslimah selama menjalani training P2KK yang tertuang dalam tata tertib aturan berpakaian muslimah yaitu “Berbusana muslimah bagi peserta putri dan tidak press body, memakai rok panjang dan bercelana panjang (leging) serta berjilbab.”

Hasil studi dokumentasi menunjukkan adanya Surat Edaran Rektor Nomor: E.5.a/558/UMM/VI/2015 tentang himbauan menggunakan pakaian Islami dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan dan tata tertib peserta P2KK. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka pola pengembangan pendidikan Islam mewujudkan budaya

religius di UMM adalah dengan pendekatan *struktural*, pendekatan ini lebih bersifat “*top down*”.

#### 4.3.2 Tahap Pengawasan

Civitas Akademika UMM menilai penampilan berpakaian mahasiswi muslimah UMM saat ini sudah wajar dan sopan. Tidak ada sanksi khusus menyikapi pelanggaran kebijakan berjilbab di kalangan mahasiswi di moment yang sudah ditentukan namun ada teguran dari satpam atau dosen yang bersifat persuasif edukatif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara :

Ada teguran-teguran, persuasif dan sifatnya mengedukasi, pada Romadhon semua harus berkerudung meski non muslim memakai kerudung sebagai wujud ekspresi menghormati. (WAR3-41-8/12/2016)

Untuk mahasiswi tidak ada sanksi tertulis tapi oleh dosen AIK diingatkan agar berjilbab selama di kampus dan di luar kampus. (DIR/A-42-17/01/2017)

Harapannya ada terobosan dari pihak akademik untuk memberi himbauan/wawasan yang bisa menekan mereka (mahasiswi muslimah:red) berjilbab. Dan jumlah satpam ditambah. (S/R-18/11/2016)

Menyikapi pelanggaran ketertiban berpakaian secara umum ada sanksi bertahap mulai dari teguran dari satpam, tarik KTM, hingga kemudian ditindaklanjuti oleh PD3. Hal ini disampaikan oleh informan :

Sanksi dari satpam terhadap mahasiswa yang penampilannya melanggar adalah ditegur, jika masih melanggar tarik KTM kemudian ditindaklanjuti oleh PD3. (S/S-26/11/2016)

Sanksi yang dikenakan pada pelanggaran aturan pakaian berjilbab saat mengikuti training P2KK berupa point yang berpengaruh terhadap kelulusan training yang sedang diikuti. Hal ini dijelaskan oleh salahsatu informan :

Di P2KK sanksi ada berupa point yang berpengaruh pada kelulusan. Jika kurang point maka lulus bersyarat. (KO/P-43-22/11/2016)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pedoman khusus bersifat legal formal tentang pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban berjilbab di UMM selain saat mengikuti training P2KK. Pengawasan dilakukan oleh semua civitas akademika dengan melakukan teguran-teguran secara *persuasif edukatif*. Hal ini tertuang dalam “Buku Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan” perihal Surat Edaran Rektor No.

E.5.a/1003/UMM/X/2007 tentang penertiban penampilan mahasiswa. Dosen, karyawan, dan satpam dihimbau untuk ikut serta menertibkan penampilan mahasiswa khususnya di kelas/di kampus. Langkah-langkah penertiban yang dilakukan Dosen antara lain:

- a. Memberi teguran
- b. Apabila tidak diindahkan, supaya dilarang mengikuti perkuliahan
- c. Dilarang masuk kampus

Fenomena di UMM masih banyak mahasiswi muslimah berkerudung namun dipadupadankan dengan celana yang relatif ketat hingga membentuk lekuk tubuh padahal hal itu bertentangan dengan ketentuan berpakaian berjilbab syar'i. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut antara lain :

- a. Faktor intern. Faktor intern ini ada beberapa aspek antara lain Kurangnya pemahaman dan kesadaran mahasiswi terhadap kewajiban berjilbab syar'i kesiapan mental, kecemasan, dan persepsi tentang definisi "jilbab".
- b. Faktor ekstern. Antara lain pengaruh keluarga, dampak pergaulan/teman, dampak modernisasi mode/fashion
- c. Ada larangan-larangan dalam berpenampilan secara umum namun belum ada sosialisasi tertulis tentang petunjuk pakaian yang syar'i
- d. Perbandingan antara jumlah satpam yang berwenang menertibkan kedisiplinan berpakaian mahasiswa dengan banyaknya mahasiswa belum seimbang
- e. Lemahnya pengawasan kebijakan berjilbab ini di UMM

#### **4.3.3 Tahap Evaluasi**

##### **1) Dampak Positif Implementasi Kebijakan Berjilbab Dengan Pendekatan Kultural/Pembudayaan**

Beberapa dampak positif implementasi kebijakan berjilbab dengan pendekatan kultural/pembudayaan, antara lain:

- (1) Menanamkan nilai-nilai Islam secara perlahan melalui proses penyadaran tanpa menimbulkan rasa keterpaksaan yang dapat membuat ketidaknyamanan mahasiswi. Hal ini sesuai dengan penjelasan salah satu informan bahwa sosialisasi jilbab di UMM secara perlahan, tujuannya adalah sebagai penyadaran dengan proses berpikir :

P2KK memberi penjelasan bagaimana kita melakukan apa yang harus dilakukan dan meninggalkan apa yang dilarang. Tidak pernah mensosialisasikan bahwa itu (jilbab) wajib, tidak mendoktrin jilbab itu

paksaan, hanya akan melakukan pengertian sehingga mereka dapat berpikir dan biarkan mereka melakukan. **(KO/P-48-22/11/2016)**

Dakwah tidak sertamerta orang harus bisa berubah, harus terus-menerus dilakukan secara sistematis pada orang-orang yang butuh kita berikan edukasi pencerahan tentang persoalan penampilan, tentang ibadah. Butuh waktu yang panjang dan hidayah untuk orang itu bisa berubah. Tapi kewajiban kita semua untuk menyampaikan kebenaran, sebagaimana perintah agama, perintah kitab suci. **(WAR3-04-8/12/2016)**

- (2) Kuantitas wanita muslimah berjilbab di UMM dari tahun ke tahun semakin terlihat meningkat. Perkembangan kuantitas muslimah UMM berjilbab dijelaskan oleh salah satu informan :

Melihat perkembangan bagaimana orang mengenakan jilbab di sini, dulu saya masuk di sini th 89, jangankan mahasiswa, dosen karyawanpun banyak yang belum berjilbab, pada th 95 semua dosen dan karyawan memakai jilbab, itu pendekatan kultural tadi diberi contoh pimpinannya, disebut-sebut kalau ada pertemuan para dosen karyawan kita ini ada di civitas Muhammadiyah, karena itu hendaknya mengamalkan ajaran bagi muslimah ya berjilbab. Urusan jilbab sekarang sudah mengenakan sendiri secara kultural tadi sudah beradaptasi mereka yg masuk ke sini. Gak usah diberitahu mereka sudah mengenakan. Tahun 2000-an, tidak hanya karyawan dan dosen yang berjilbab tapi mahasiswa makin banyak yang berjilbab. **(DIR/A-47-17/01/2017)**

- (3) Memperkuat karakter Islami mahasiswa karena UMM adalah universitas berbasis nilai-nilai Islam yang berafiliasi pada Muhammadiyah. Hal ini dijelaskan oleh informan :

Kita ingin mahasiswa memiliki karakter, dia smart, dia santun. **(WAR1-06-8/12/2016)**

## **2) Dampak Negatif Implementasi Kebijakan Berjilbab Dengan Pendekatan Kultural/Pembudayaan**

Beberapa dampak negatif implementasi kebijakan berjilbab dengan menggunakan pendekatan pembudayaan/kultural, antara lain:

- (1) Tidak cepat terjadi perubahan dari yang tidak berjilbab menjadi berjilbab. Dampak negatif tersebut merupakan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan. Salah informan menjelaskan :

Pengandaian oleh pimpinan jika diberlakukan kebijakan legal formal berjilbab akan terjadi keterpaksaan. Memang plus minus, tidak lekas dan tidak cepat terjadi perubahan dari yang tidak berjilbab menjadi berjilbab semuanya. **(DIR/A-49-17/01/2017)**

Derajat perubahan dalam waktu satu minggu (pelaksanaan P2KK) belum cukup untuk merubah perilaku, memberikan pandangan atau penyadaran dan pendekatan personal untuk mengingatkan dan sharing karena dalam perkuliahan teman-teman banyak dan bermacam-macam **(KO/P-51-22/11/2016)**

- (2) Image UMM terkesan tidak tegas menyikapi kewajiban berjilbab karena lemahnya pengawasan. Hal ini dijelaskan oleh para informan :

Setengah-setengah tentang kebijakan akan terkesan universitas tidak tegas. **(Kaur/K-50-23/11/2016)**

- (3) Tidak ada tolok ukur pencapaian tujuan kebijakan berjilbab karena tidak ada evaluasi tentang implementasi kebijakan berjilbab. Hal ini berdasarkan hasil wawancara :

Jika ketahuan melanggar diberi teguran. Evaluasi saat ini tidak ada karena itu nanti berhubungan dengan angka. **(Do/A-52-17/02/2017)**

### **3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Berjilbab Di Universitas Muhammadiyah Malang**

#### **(1) Visi Misi UMM**

Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Malang memiliki kesatuan persepsi tentang visi ke depan yaitu “Dari Muhammadiyah untuk bangsa”. Sedangkan misinya adalah “Melahirkan sarjana yang memiliki integritas moral dan intelektual, mengembangkan bidang IPTEK dan seni berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman agar menjadi universitas terkemuka di tingkat nasional dan internasional.” Visi misi tersebut menjadi penyebab lahirnya kebijakan berjilbab bagi muslimah. Hal ini dijelaskan oleh informan :

Visi misi UMM ingin mengembangkan menjadi universitas terkemuka di bidang iptek dan seni berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman. **(WAR1-01-8/12/2016)**

Visi besarnya dari Muhammadiyah untuk bangsa, misi pendidikan mencetak sarjana cerdas akhlak dan cerdas akalnya. Muhammadiyah itu organisasi massa Islam, pendidikannya juga harus berbasis nilai-nilai ke-Islaman. **(WAR3-02-8/12/2016)**

Hasil wawancara sesuai dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa UMM memiliki karakteristik tersendiri yang menunjang realisasi visi misinya. Karakteristik

tersebut antara lain adanya UPT P2KK (Program Pembentukan Kepribadian dan kepemimpinan), mata kuliah AIKA, adanya Masjid Ar Fachruddin. Mahasiswa pun telah paham tentang visi misi UMM tersebut, hal ini sesuai dengan hasil wawancara :

Visi misi UMM adalah membentuk kepribadian setiap mahasiswa/mahasiswi untuk lebih Islami (MS1/J—03-18/11/2016)

## **(2) Tujuan Kebijakan Berjilbab**

Muhammadiyah adalah gerakan *tajdid* (pembaharuan) dan gerakan dakwah. UMM yang berafiliasi pada Muhammadiyah konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai upaya perubahan kultur melalui proses yang tidak instant melainkan proses dakwah yang terus-menerus dan butuh waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara

Dakwah tidak sertamerta orang harus bisa berubah, harus terus-menerus dilakukan secara sistemik pada orang-orang yang butuh kita berikan edukasi pencerahan tentang persoalan penampilan, tentang ibadah. Butuh waktu yang panjang dan hidayah. Kewajiban kita semua untuk menyampaikan kebenaran. sebagaimana perintah agama, perintah kitab suci. (WAR3-04-8/12/2016)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa tujuan kebijakan berjilbab di UMM adalah menjalankan nilai-nilai Islam melalui dakwah dan menyampaikan kebenaran sebagaimana perintah agama. Hasil observasi menunjukkan mahasiswa telah paham tentang tujuan kebijakan berjilbab ini dan hasil studi dokumentasi pada tanggal 22 November 2016, peneliti mendapatkan buku Materi Keislaman dan Ibadah P2KK yang menjelaskan bahwa tujuan berjilbab untuk menjalankan perintah Allah SWT.

## **(3) Persepsi tentang Makna Jilbab**

Civitas Akademika UMM memiliki persamaan persepsi tentang makna jilbab bahwa jilbab adalah kain penutup kepala hingga dada (bagian tubuh wanita dibawah kepala yang wajib ditutupi) yang dikenakan sebagai upaya menjalankan perintah Allah SWT untuk menutup aurat. Jilbab adalah bagian dari substansi pakaian taqwa yang dimaksud dalam Al Qur'an surat Al A'raf ayat 26.

## **(4) Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial menurut Angga, merupakan “wilayah” tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok beserta pranata, simbol, dan norma dan terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan/ buatan. (Angga, 2011) Kebijakan UMM dibangun sebagai sarana syiar islam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara

Syiar itu menyemarakkan lalu syiar itu macem-macem. Istilah syiar itu terlalu simbolik. Kita kuliah melakukan riset publikasi temuan penelitian, itu syiar, pakaian itu syiar. (WAR1-16-8/12/2016)

UMM lebih memilih pendekatan pembudayaan/kultural dalam kebijakan berjilbab ada hubungannya dengan faktor lingkungan sosial, antara lain:

- (1) Mahasiswa UMM berasal dari beragam agama
- (2) Mahasiswa UMM berasal dari latarbelakang kultur Islam yang beragam
- (3) UMM adalah lembaga pendidikan harus tetap pegang prinsip pada prestasi pendidikan akademik
- (4) Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan/tajdid dan gerakan dakwah, mengutamakan penyadaran

Keadaan lingkungan sosial mempengaruhi keputusan pemilihan pendekatan kebijakan. Hal ini dijelaskan oleh salah satu informan :

Semua agama ada di sini, agama apapun yang ada di sini wajib mengikuti AIKA 1,2,3,4 akar mereka tau Muhammadiyah, tidak membenci Muhammadiyah. Silahkan datang untuk menimba ilmu, tidak boleh kita memaksa orang yang sudah beragama, *lakum dinukum waliyadin*. (WAR3-17-8/12/2016)

#### **(5) Komunikasi yang tepat dan konsisten.**

Komunikasi dimaksudkan agar proses transfer informasi dari para pembuat keputusan kepada para implementator semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan berjilbab. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara:

Kebijakan berjilbab di Bulan Ramadhan jelas melalui surat edaran Rektor (Ka/A/MKDU-32-17/02/2017)

Di P2KK sudah ada aturan tertulis, revisi dikarenakan perbedaan kondisi peserta yang mengakibatkan perlu diadakannya peraturan baru. Evaluasi dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu Perencanaan, koordinasi dan evaluasi dilakukan secara global di Selasa malam. (P/I-33-17/02/2017)

Observasi tanggal 22 November 2016 di UPT P2KK peneliti menemukan data dokumen berupa buku “Pedoman Materi KeIslaman dan Ibadah, Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan, Universitas Muhammadiyah Malang” bagian III (keputrian) tentang fiqh perempuan dijelaskan arti jilbab bahwa “Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada. Dalam arti asli bahwa jilbab adalah baju gombong yang dapat menutup seluruh tubuh.” sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab:59. Sedangkan informasi yang berkembang di lingkungan UMM termasuk fasilitator P2KK memaknai jilbab sebagai kain penutup kepala hingga dada saja. Sehingga ada komunikasi yang realtif tidak konsisten antara buku pedoman dengan sosialisasi makna jilbab yang sesungguhnya.

#### **(1) Sumber Daya.**

Sumber daya ini meliputi:

- (1) Informasi, yaitu informasi adanya himbauan kewajiban berjilbab melalui surat edaran Rektor
- (2) Wewenang, bahwa surat edaran dikeluarkan oleh pihak yang benar-benar berwenang sesuai tupoksi masing-masing. Surat edaran Rektor tentang kebijakan berjilbab di Bulan Ramadhan disusun oleh BAA (Biro administrasi Akademik) di bawah kepemimpinan Wakil Rektor 2 sebagai pemegang wewenang bidang sarana prasarana dan sdm pengelola yang ditandatangani oleh Rektor UMM. Kepala bagian AIKA dan MKDU menjelaskan alur komunikasi kebijakan berjilbab.

Kebijakan berjilbab di Bulan Ramadhan ditetapkan melalui Surat Edaran Rektor. Surat edaran Rektor ini yang bertugas mengedarkan adalah Wakil Rektor 2 sebagai civitas akademika yang memiliki kewenangan pengelola sarana prasarana dan sumber daya manusia (sdm) ke masing-masing wakil rektor yaitu wakil rektor 1 yang menangani konten/isi saat pembelajaran nilai-nilai Islam diterapkan dan wakil rektor 3 yang menangani kemahasiswaan. Dari masing-masing Wakil rektor, edaran disampaikan ke semua program Studi (ada 37 prodi) dan unit meliputi UPT (Unit Pelaksana Teknis), Badan kendali mutu, dan lembaga (infokom dan kebudayaan). Dari Kaprodi surat edaran rektor tersebut disampaikan ke seluruh civitas akademika (semua yang terlibat dalam kegiatan kampus) termasuk dosen, karyawan, dan mahasiswa. Di AIKA langsung diedarkan/ disosialisasikan, ditegur jika belum menutup aurat. **(DO/A-34-17/02/2017)**



(3) Fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung sosialisasi kebijakan berjilbab adalah mading, papan pengumuman, website baik universitas maupun fakultas, dan instruksi dosen pembina mata kuliah. Surat edaran Rektor tentang kewajiban berjilbab di Bulan Ramadhan akan dipublikasikan melalui media-media komunikasi tersebut. Ada penjelasan larangan-larangan dalam penampilan di UMM melalui baliho, banner, pengumuman-pengumuman namun sementara ini masih belum ada fasilitas yang mensosialisasikan tentang pakaian muslimah yaitu jilbab syar'i, sesuai dengan hasil wawancara dengan informan :

Belum ada media seperti banner atau baliho yang menyampaikan pesan tentang jilbab syar'i (Do/A-36-17/02/2017)

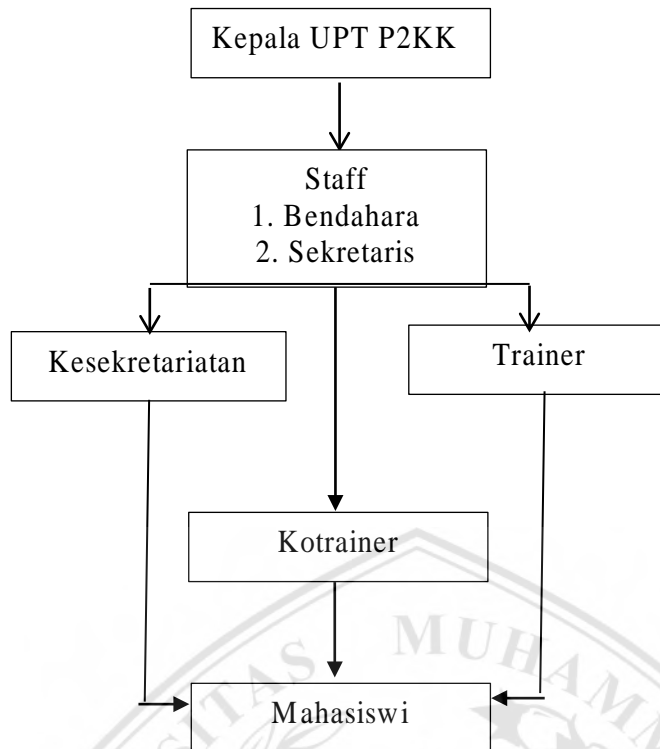
#### **(7) Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan)**

Para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Setelah menerima surat edaran Rektor tentang kewajiban berjilbab di Bulan Ramadhan, maka para pelaksana kebijakan segera mendisposisikan/pengalihan wewenang kebijakan tersebut kepada pihak-pihak yang berada di bawah kepemimpinannya, hingga akhirnya kebijakan tersebut sampai ke mahasiswa. Salah satu informan menjelaskan

Mendisposisikan kepada pejabat di bawah wewenangnya sesuai struktur organisasi. Sesuai urutan misalnya Wakil Rektor 1 mendisposisikan kepada dekan kemudian Kaprodi. Wakil Rektor 3 mendisposisikan kepada Kabirol kemudian dilanjutkan kepada Kepala Bagian (Kabag) kemudian ke karyawan dan mahasiswa. (Ka/PKMA-38-17/02/2017)

#### **(8) Struktur Birokrasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan berjilbab menuntut adanya kerjasama semua pihak di sivitas akademika UMM. Kerjasama tersebut membutuhkan struktur birokrasi yang kondusif sehingga sumber-sumber daya menjadi efektif dan termotivasi menjalankan kebijakan yang diterapkan. Struktur birokrasi yang kondusif terbukti dengan adanya struktur organisasi yang tertulis dan dapat diketahui oleh semua stakeholders, antara lain struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Malang, Struktur organisasi BAA, dan Struktur organisasi P2KK. Contoh Salah satu struktur birokrasi sederhana sebagai sarana pendisposisian wewenang sosialisasi kebijakan berjilbab di P2KK adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Staff : Karyawan tetap 1 orang, karyawan kontrak 2 orang

Kesekretariatan: administrasi dan bendahara

Trainer : Bertanggungjawab menyampaikan materi di kelas

Kotrainer: mendampingi / membimbing keseharian peserta di kelas (**Ko/A/I-40-17/02/2017**)

## 5. Pembahasan

### 5.1 Persepsi Civitas Akademika UMM tentang Kewajiban Berjilbab

Persepsi mayoritas dari para pembuat kebijakan (sivitas akademika UMM) menjadi refleksi persepsi pemahaman jilbab di lingkungan mahasiswa dan sivitas akademika UMM. Persepsi yang berkembang di lingkungan UMM bahwa “Menutup aurat hukumnya wajib, dan “jilbab” adalah kain penutup kepala hingga dada.” Sementara itu informasi yang sampai kepada mahasiswa tentang jilbab syar’i tidak berasal dari UMM namun didapat dari pengajian-pengajian di luar UMM.

Keberagaman persepsi tentang makna jilbab yang berkembang di lingkungan UMM ini sesuai dengan hasil penelitian tesis oleh Desi Erawati tahun 2009 tentang fenomena berjilbab di kalangan mahasiswi UMM menunjukkan bahwa persepsi dan motivasi mahasiswa dalam berjilbab sangat beragam. Makna jilbab yang berkembang

di UMM tidak sesuai dengan tafsir Al Qur'an oleh Imam Al Qurtubi tentang makna jilbab.

## **5.2 Implementasi Kebijakan Berjilbab Di UMM**

UMM mengambil kebijakan dalam mensosialisasikan kewajiban berjilbab ini secara *persuasif edukatif* (bersifat mendidik dan mengingatkan) melalui *pendekatan pembudayaan/kultural*. Implementasinya berupa surat edaran Rektor tentang himbauan berjilbab saat Bulan Ramadhan dan pendidikan berjilbab saat moment-moment tertentu seperti pengajian, training P2KK dan pembelajaran AIKA. Tidak ada perencanaan khusus dalam merespon kebijakan itu. Hal ini dikarenakan semua Civitas Akademika telah memahami tugas masing-masing untuk segera mendisposisikan surat edaran tersebut kepada unit-unit yang ada di bawah kepemimpinannya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban berjilbab bagi mahasiswi muslimah dilaksanakan oleh seluruh Dosen, Karyawan, dan Satpam. Tindakan terhadap pelanggaran berupa teguran secara *persuasif edukatif*. Fenomena yang dapat dilihat adalah banyaknya mahasiswi muslimah berkerudung tapi dipadupadankan dengan celana yang relatif ketat hingga membentuk lekuk tubuh. Alasan/motif mahasiswi menggunakan celana yang relatif ketat dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern, namun pengawasan kebijakan berjilbab yang relatif lemah di UMM juga termasuk salahsatu faktor penyebabnya.

Implementasi kebijakan berjilbab di UMM menggunakan pendekatan pembudayaan/kultural tanpa adanya reward dan punishment sedangkan pengawasan berupa teguran-teguran yang bersifat persuasif edukatif. Hal ini sesuai dengan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan berspektif *top down policy* artinya suatu kebijakan publik yang implementasinya menggunakan instruksi, keputusan, dari pemerintah pusat dan di daerah sebagai pelaksana keputusan. Namun perlu ada perhatian untuk memulai adanya evaluasi bagi implementasi kebijakan berjilbab.

## **5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Berjilbab Di Universitas Muhammadiyah Malang**

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan berjilbab di UMM dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

### **5.3.1 Visi Misi UMM**

UMM berafiliasi kepada Muhammadiyah. Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Malang memiliki kesatuan persepsi tentang visi dan misi.

### **5.3.2 Tujuan Kebijakan Berjilbab**

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi bahwa tujuan kebijakan berjilbab di UMM adalah menjaga nilai-nilai Islam menjalankan perintah Allah SWT yaitu menutup aurat bagi muslimah melalui gerakan dakwah, agar mahasiswa menjadi mahasiswa yang berkarakter kuat.

### **5.3.3 Makna Jilbab**

Ada persamaan persepsi tentang hukum mengenakan jilbab yaitu “wajib”, namun ada perbedaan persepsi tentang makna jilbab. Mayoritas civitas akademika UMM berpendapat bahwa jilbab adalah kain penutup kepala hingga dada (bagian tubuh wanita dibawah kepala yang wajib ditutupi).

### **5.3.4 Lingkungan Sosial**

Kebijakan UMM tentang kewajiban berjilbab dilakukan melalui metode pendekatan pembudayaan/kultural bertahap. Pendekatan yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mahasiswa UMM terdiri dari beragam agama dan latarbelakang kultur Islam yang beragam sehingga diperlukan proses penyadaran (evolusi sosial) tentang kewajiban berjilbab sehingga mahasiswa tetap merasa nyaman tidak ada keterpaksaan.

### **5.3.5 Komunikasi tepat dan konsisten.**

Bahasa yang digunakan dalam surat edaran rektor tepat dan konsisten. Komunikasi terjadi secara tepat dan otomatis sesuai sistem birokratis. Komunikasi tentang kebijakan berjilbab sudah tepat sasaran, namun masih belum konsisten. Inkonsistensi ini adalah adanya perbedaan antara informasi tentang makna jilbab yang ada di kalangan mayoritas Civitas Akademika dan mahasiswi muslimah dengan data makna jilbab yang tertera dalam Buku Pedoman “Materi Keislaman dan Ibadah, Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan, Universitas Muhammadiyah Malang”.

Kebijakan dengan pendekatan pembudayaan dibangun melalui pendekatan persuasif edukatif dan keteladan. Hasil Observasi menemukan bahwa saat training P2KK berlangsung, semua diwajibkan memakai rok dan ada sanksi ringan, sedang, berat bagi yang melanggar. Namun setelah training P2KK selesai, keadaan tampak

berbeda. Warga muslimah UPT P2KK kembali mengenakan celana. Hal ini dapat berdampak memberikan kesan “tidak konsisten” terhadap aturan berpakaian bagi muslimah yang telah diajarkan, dan akan membuat mahasiswa menjadi ambigu tentang makna dan tujuan berjilbab.

#### **5.3.6 Sumber Daya.**

Faktor Sumber Daya meliputi informasi, wewenang dan fasilitas yang mendukung. Informasi, yaitu informasi adanya himbauan kewajiban berjilbab yang jelas dan konsisten melalui surat edaran Rektor, namun tidak ada informasi tentang batasan-batasan aturan berjilbab yang sesuai dengan syariat Islam. Wewenang, bahwa surat edaran dikeluarkan dan diedarkan oleh pihak yang benar-benar berwenang sesuai tupoksi masing-masing. Fasilitas, Surat edaran Rektor tentang kewajiban berjilbab di Bulan Ramadhan akan dipublikasikan melalui media-media komunikasi seperti mading, papan pengumuman, website baik universitas maupun fakultas, dan instruksi dosen pembina mata kuliah. Sementara ini, belum ada sosialisasi melalui media informasi tersebut tentang pakaian muslimah yaitu jilbab syar’i.

#### **5.3.7 Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan)**

Respon positif terhadap edaran surat Rektor tampak saat seluruh sivitas akademika UMM melaksanakan kebijakan berjilbab secara sukarela tanpa adanya paksaan. Sivitas akademika kemudian segera mendisposisikan/pengalihan wewenang kepada pihak yang berada di bawah kepemimpinannya hingga akhirnya pesan tersebut sampai ke mahasiswa.

#### **5.3.8 Struktur Birokrasi.**

Keberhasilan implementasi kebijakan berjilbab menuntut adanya kerjasama semua pihak di sivitas akademika UMM. Kerjasama tersebut terlaksana karena ada struktur birokrasi yang kondusif sehingga sumber-sumber daya menjadi efektif dan termotivasi menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi yang kondusif terbukti adanya struktur organisasi yang tertulis dan dapat diketahui oleh semua stakeholders, antara lain struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Malang, Struktur organisasi BAA, dan Struktur organisasi P2KK.

### **6. Penutup**

#### **6.1 Simpulan**

6.1.1 Kebijakan berjilbab di UMM bersifat *persuasif edukatif* (bersifat mendidik dan mengingatkan) melalui *pendekatan pembudayaan/kultural*. Artinya kebijakan

dilaksanakan tanpa adanya reward dan punishment, sedangkan upaya pengawasan dengan melakukan teguran-teguran.

6.1.2 Makna jilbab yang berkembang di UMM tidak sesuai dengan tafsir Al Qur'an oleh Imam Al Qurtubi tentang makna jilbab.

6.1.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berjilbab di UMM antara lain visi misi, tujuan kebijakan, persepsi tentang makna jilbab, lingkungan sosial, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan berjilbab di UMM sesuai dengan model implementasi kebijakan George C. Edward III

## **6.2 Saran-Saran**

6.2.1 Syiar Islam kebijakan berjilbab hendaknya menitikberatkan pada pemahaman mahasiswa tentang jilbab yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits baik secara tekstual maupun kontekstual.

6.2.2 UMM hendaknya memberikan perhatian serius terhadap beberapa faktor penentu keberhasilan kebijakan yang masih memiliki kelemahan sebagai hasil dari penelitian ini. Perlu adanya perhatian di faktor pengawasan, pemaknaan jilbab sesuai syariat Islam, faktor komunikasi, dan faktor sumberdaya khususnya fasilitas.

## **7. Rujukan**

- Agustino (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Al Jawi, M Shiddiq (2016) Perbedaan Kerudung dengan Jilbab Menurut Islam | Kajian Islam Kaffah. [kajianislamkaffah.blogspot.com/2016/08/perbedaan-kerudung-dengan-jilbab.htm](http://kajianislamkaffah.blogspot.com/2016/08/perbedaan-kerudung-dengan-jilbab.htm). Diakses tanggal 9 Maret 2017. Pukul 20.30
- Alami, Annise (2013). *Efektifitas implementasi kebijakan fakultas tentang penggunaan seragam dalam rangka pembentukan karakter calon guru di fkip UNS*. <https://core.ac.uk/download/pdf/12345990.pdf>. Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi (BISE) Vol.1 No. 1. Diakses tanggal 19 April 2016 pukul 10.00.
- Ali, Muhammad (2016). *membedah tujuan pendidikan muhammadiyah - journal-ums* <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/2099/1489>. Jurnal Studi Islam, Vol. 17, No. 1, Juni 2016: 43-56. Diakses tanggal 11 Maret 2017. Pukul 08.45.
- Arifin, Zainal (2012). Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. *Pendidikan Multikultural-Religius untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik yang Humanis-Religius* Jurnal Pendidikan Islam - Pengutipan Google Cendekia. Jurnal Pendidikan Islam vol 1 (1), 89-103. Diakses tanggal 9 Maret 2017. Pukul 20.00
- Arlin, Megan (2012) mengenakan „pribadi - Program Studi Seni Rupa FSRD ITB [www.senirupa.itb.ac.id/wp-content/upload/jurnal/jurnal-17008013.pdf](http://www.senirupa.itb.ac.id/wp-content/upload/jurnal/jurnal-17008013.pdf). Diakses tanggal 19 April 2016 pukul 13.55.
- Aziz, Moh Ali (2015). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Badaruddin, Kemas (2009). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

- Basri, Hasan (2014). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Belajar Al Qur'an dan Hadist (2013) <https://id-id.facebook.com/notes/semua-tentang-wanita/kriteria-jilbab-syari-atau-syarat-jilbab-menurut-al-quran-dan-as-sunnah/628908433814061/> Diakses tanggal 12 Desember 2015 pukul 12.35
- Danang, Angger (2015). *Kebijakan Pendidikan Karakter di SMP 3 Banjarnegara*. *Jurnal UNY*. [journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/14585/12/1495](http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/14585/12/1495). Diakses tanggal 14 Desember, pukul 11.00
- Daud, Fathonah K (2013) *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 3, Nomor 1, Maret 2013* ...  
[download.portalgaruda.org/article.php?article...JILBAB,%20HIJAB%20DAN%20AU](http://download.portalgaruda.org/article.php?article...JILBAB,%20HIJAB%20DAN%20AU) Diakses tanggal 11 Maret 2017 pukul 10.00
- Wisakti, Daru (2008). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan*. Tesis Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH ... <https://core.ac.uk/download/pdf/11716714.pdf> Diakses tanggal 14 Maret 2017. pukul 07.00
- Hadrami (2017). *Ceramah Islami*. Masjid Kota Malang
- Imron, Ali (2008) *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia di Indonesia. Proses, Produk dan masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novitasari, Yasinta Fauziah (2014). *JILBAB SEBAGAI GAYA HIDUP (Studi Fenomenologi Tentang Alasan Perempuan Memakai Jilbab dan Aktivitas Solo Hijabers Community*. [jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/download/3620/2535](http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/download/3620/2535) vol 4, No 1. Diakses tanggal 31 Desember 2015 pukul 20.07
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015). [www.muhammadiyah.or.id/content-49-det-profil.html](http://www.muhammadiyah.or.id/content-49-det-profil.html). Diakses tanggal 14 Desember 2015. Pukul 10.15.
- Sahlan, Asmaun (2010). *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah*. Malang: UIN-Maliki Press
- Solichin, Mujianto (2015). *Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang – Indonesia. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PERAN BIROKRASI* [www.journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/download/486/43](http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/download/486/43). Diakses tanggal 10 Maret 2017. pukul 17.20.
- Subhan, Muhammad Imtiaz (2011). *New Article of Clothing translates the Mood of an Individual* [www.ijbssnet.com/journals/Vol\\_2.../21.pdf](http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_2.../21.pdf) Diakses tanggal 19 April 2016.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyadi (2015). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Al Qur'anul Karim



Tentang

**NERTIBAN PENAMPILAN MAHASISWA**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Universitas Muhammadiyah Malang bertekad memelihara dan menjaga suasana kampus yang bersih dan nyaman untuk suasana belajar yang baik, suasana tersebut akan tercipta apabila para Civitas Akademikanya juga selalu menjaga kerapian dalam berpenampilan.
2. Adapun hal-hal yang dianggap penampilan yang kurang menjaga kerapian adalah :
  - a. Bagi Mahasiswa :
    - Memakai kaos oblong.
    - Memanjangkan rambut secara berlebihan.
    - Memakai sandal, terutama sandal jepit.
    - Memakai asesoris/perhiasan yang tidak semestinya.
  - b. Bagi Mahasiswa :
    - Memakai baju tidak longgar dan kurang menutupi aurat.
    - Memakai asesoris/perhiasan dan make-up yang berlebihan.

3. Berkenaan dengan hal di atas, maka kami mohon kepada bapak/ Ibu dosen, karyawan, dan satuan pengamanan (SATPAM) di Universitas Muhammadiyah Malang untuk ikut menertibkan cara berpenampilan mahasiswa khususnya di kelas/ di kampus dengan :

- a. Memberi teguran
- b. Apabila tidak diindahkan, supaya dilarang mengikuti perkuliahan
- c. Dilarang masuk kampus

untuk kegiatan belajar mengajar

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 29 Oktober 2007

Rektor,

Muhadjir Effendy

Tembusan Yth. Para :

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Kepala Biro
4. Pembantu Dekan
5. Ketua Jurusan/ Ketua Program
6. Kepala Bagian
7. Ketua BEMU, BEMFA, SEFA, HMI, & UKM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang



## **STUDI DOKUMENTASI**



### **UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN DAN KEPEMIMPINAN (UPT P2KK)**

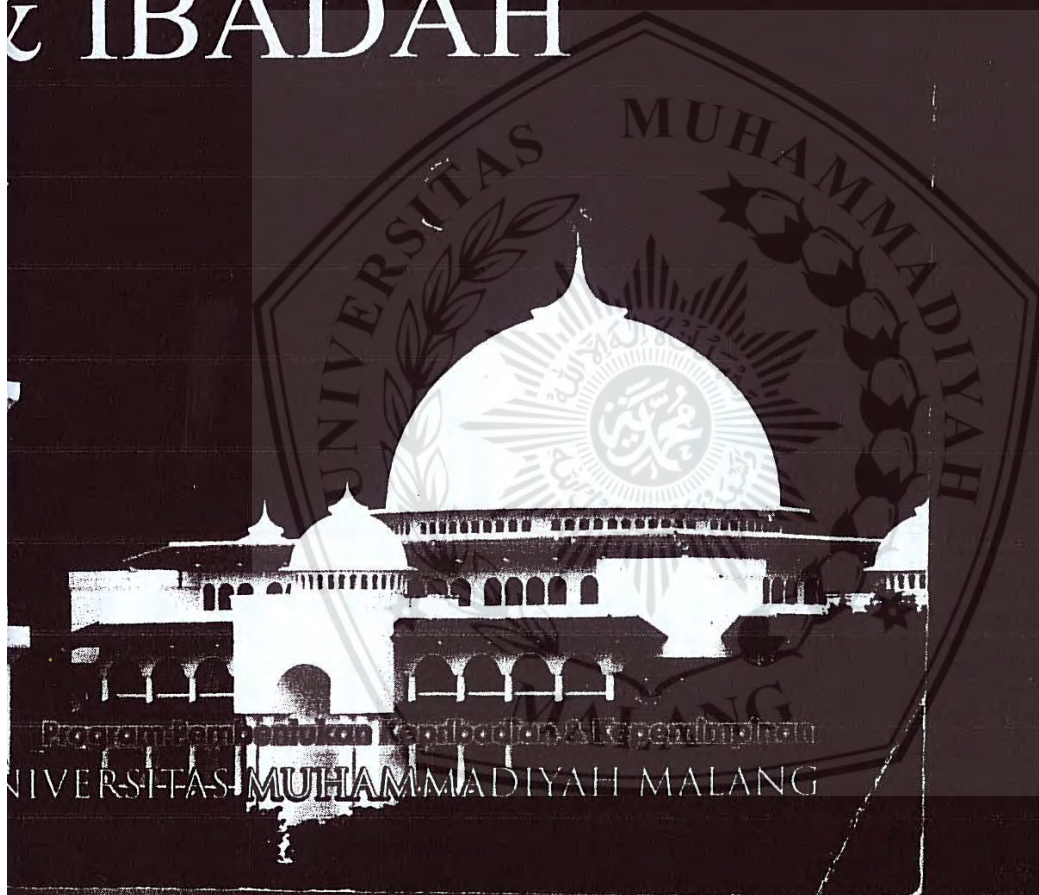
#### **5 (LIMA) PILAR MAHASISWA UMM:**

1. DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA
2. DILARANG MENGGUNAKAN DAN TERLIBAT NARKOBA - MIRAS
3. DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL
4. DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN ANARKIS, BERKELAH, VANDALISME DAN SEJENISNYA
5. WAJIB SHOLAT LIMA WAKTU (MUSLIM) DAN MELAKSANAKAN IBADAH SESUAI AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA (NON MUSLIM)





# MATERI KEISLAMAMAN & IBADAH





## 2. Ciri-ciri Tabarruj.

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang ciri-ciri tabarruj dijamin jahiliyyah hingga sekarang, yaitu:

- a. Pendapat Mujahid bahwa seorang perempuan yang keluar dari rumah dan berjalan diantara lelaki.
- b. Pendapat Qatadah bahwa seorang perempuan yang berjalan berleggak-leggok dan penuh gaya dan genit.
- c. Pendapat Ibnu Abi Najih bahwa seorang perempuan yang memakai wangi-wangian.
- d. Pendapat al-Kalabiy bahwa perempuan yang mengenakan pakaian yang terbuat dari batu permata, kemudian ia memakainya, dan berjalan ditengah jalan.
- e. Pendapat ..... perempuan yang mengenakan kerudung namun tidak menutupnya, hingga anting-anting dan kalungnya terlihat .....

## 3. Tampilan muslimah adalah kemuliaan perempuan islam.

Berhias adalah menampilkan keindahan. Berhias diri merupakan naluri manusia. Dalam Hadis Nabi SAW dinyatakan "Allah itu indah suka pada keindahan".

Secara syar'iy, tampilan seorang muslimah adalah berbeda dengan perempuan pada umumnya. Seorang muslimah merupakan pribadi yang terikat dengan tatanan nilai islam yang diyakini sebagai kebenaran. Kemuliaan seorang muslimah justru terletak pada terpelihara dan terjanya diri dari destroyer's instrument (alat perusak) dan perangkat yang digunakan untuk menjarang manula yang lemah iman untuk mempertuturkan hawa nafsu yang tak terkendali dan tak pernah terpuaskan. Seorang muslimah sejati adalah orang yang menjaga kemuliaan diri dari motif-motif perilaku yang negatif. Seorang muslimah harus menjaga niat yang lurus untuk apa dia berhias dan tampil. Akan tetapi orang yang tidak rela melihat keluhuran dan kemuliaan seorang muslimah dalam naungan tatanan islam, berusaha dengan berbagai cara membelokkan niatan yang lurus itu. Firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 27.

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَرِيذُ أَنْ يُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ

فَلْيَسْأَلُوا اللَّهَ عَنِ الظَّالِمِينَ

Artinya : Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).

## 4. Siapa yang menyuruhmu berjilbab ?

Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Dalam arti asli bahwa jilbab adalah baju gombong yang dapat menutup seluruh tubuh. Namun masih ada muslimah yang memandang bahwa berjilbab hanya sebatas tradisi adat istiadat yang diwarisi dari orang tuanya dan sebagai bukti bahwa orang tuanya yang menyuruh. Oleh karena itu sebagai warisan, maka harus dijaga dan dilestarikan untuk berjilbab, atau berjilbab sebagai mode yang berkembang, bahkan seragam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُنَّ أَصْنَافَ خَلْسِيَّوْنَ ذَٰلِكَ أَتَىٰ أَنْ يُعْرِضَ وَلَا يُؤْذِنَ وَكَرِهَ اللَّهُ غُفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Seharusnya seorang muslimah senantiasa memelihara penampilan dan menjaga kebersihan diri, juga tidak dilarang berhias diri dan berbusana yang layak sebagaimana diperintahkan dalam QS AL-A'raf ayat 26.

يٰٓاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُؤْرِىْ سَوْءَ بَعْدِكَ وَرَدٰىكَ وَرَدٰىكَ اَلْقَوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ عٰلَمٍ لَّا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat".





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi - Fakultas Teknik  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Pertanian dan Peternakan  
Fakultas Kedokteran - Fakultas Ilmu Kesehatan - Program Pasca Sarjana

Kampus I : Jl. Bandung 1 Telp. 0341-551253 Fax. 0341-562124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188A Telp. 0341-552443, 551149 (Hunting) Fax. 0341-582060 Malang 65145

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341-464318-319 Fax. 0341-460435, 460782 Malang 65144

E-mail : webmaster@unbr.umma.ac.id Website : www.umma.ac.id

## SURAT EDARAN REKTOR

Nomor : E.5.a/558/UMM/VI/2015

Kepada Yth : 1. Para Pejabat Struktural  
2. Para Dosen & Karyawan  
3. Para Mahasiswa & Mahasiswi  
Di Universitas Muhammadiyah Malang.

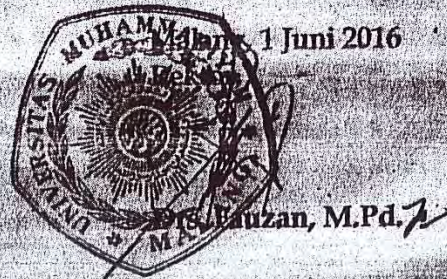
*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan tahun 1437 Hijriyah, yang bertepatan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, diharapkan kepada seluruh Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan ibadah dan amaliah mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Meningkatkan kegiatan keagamaan baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
3. Menghindari perbuatan dan tindakan yang dapat membatalkan ataupun mengurangi nilai pahala ibadah puasa.
4. Bagi para dosen putri/karyawati/mahasiswi diharuskan menggunakan pakaian yang islami yaitu berlengan panjang, menutup aurat (celana / rok panjang, berjilbab) serta tidak ketat.
5. Seluruh pejabat struktural / non struktural bertugas sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan hal-hal tersebut di lingkungan masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*







# UPT. PROGRAM PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN & KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kantor: Jl. Karyawiguna No. 370, Legalgondo, Karangploso, Malang, Telp. 085101345457 081252029444

## TATA TERTIB PESERTA P2KK

### I. KETENTUAN UMUM

1. Peserta Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
2. Selama kegiatan peserta disediakan penginapan, konsumsi, pelayanan kesehatan dan alat komunikasi untuk menerima telepon dari pihak keluarga (sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia)

### II. KEWAJIBAN PESERTA

1. Melakukan registrasi (*check In*) untuk mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada hari Senin jam 07.00 – 08.00 wib
2. Bertempat tinggal di Rusunawa I (belakang kampus III Universitas Muhammadiyah Malang) selama kegiatan berlangsung.
3. Mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan hadir 10 menit sebelum kegiatan dimulai
4. Menjaga ketenangan, kebersihan lingkungan rusunawa dan keamanan
5. Menggunakan tanda pengenal atau id card (disediakan panitia) dan jas almamater selama kegiatan
6. a. Membawa jas almamater, pakaian formal, bawahan **non** jeans, pakaian olahraga, pakaian istirahat  
b. Peralatan untuk sholat (sarung, mukena, sajadah), dan **al-qur'an** terjemah (Bagi yang Muslim)
7. Berbusana muslimah bagi peserta putri dan tidak *pres body*, memakai rok panjang dan *bercelana panjang* (*legging*) serta berjilbab.
8. Atribut:
  - a. Hari Senin, Selasa : Atas putih, bawah gelap (putra berdasi; putri berjilbab putih), (*memakai jas almamater*)
  - b. Hari Rabu, Kamis : Atas batik bawah gelap (putri berjilbab hitam), (*memakai jas almamater*)
  - c. Hari Kamis (pagi) : Pakaian olahraga (*trening*)
  - d. Hari Jumat : Atas bebas formal, bawah gelap, (*memakai jas almamater*)
  - e. Hari Sabtu : Atas putih, bawah gelap (putra berdasi, putri berjilbab putih), (*memakai jas almamater*)
9. Menghafal Asma'ul Husna bagi yang muslim (Bisa diunduh di web. P2KK)

### III. LARANGAN PESERTA

1. Menerima kunjungan dari keluarga dan atau pihak lain
2. Terlambat masuk kelas lebih dari 5 menit
3. Tidak memakai tanda pengenal dan jas almamater
4. Keluar kelas tanpa alas kaki (ketika berwudhu/ ke kamar mandi)
5. Kembali ke kamar tanpa izin (pada saat materi)
6. Tidak memakai jilbab di luar kamar (Kecuali non-Muslim)
7. Tidak mematikan lampu kamar mandi (siang hari)" bagi yang keluar terakhir"
8. Menyalakan atau menonton tv
9. Tidak merapikan sepatu atau sandal sesuai tempatnya
10. Memakai bakiak/sandal kelas selain untuk berwudhu
11. Memakai kaos oblong pada saat mengikuti materi (Kecuali pada saat Outbond)
12. Membeli makanan di luar area Rusunawa
13. Berkeluaran pada saat jam malam
14. Melakukan kegaduhan
15. Tidak mengambil id card yang disita sampai batas waktu yang ditentukan
16. Tidak mengikuti materi P2KK
17. Tidak membawa buku Panduan P2KK (buku kepribadian, keislaman dan ibadah serta Lembar Kerja)
18. Memakai aksesoris yang kurang sopan
19. Berambut gondrong atau memakai jeans
20. Mengecat rambut atau memakai celana/rok ketat/berbahan sifon
21. Berpindah kamar/ menempati kamar tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan panitia
22. Meninggalkan ruangan dan lokasi pelatihan tanpa izin dari trainer/satgas
23. Membawa dan memakai perhiasan yang berlebihan, peralatan elektronik dan atau kendaraan
24. Membawa/menyimpan rokok dan atau HP
25. Melakukan tindakan kriminal, vandalisme, asusila, perkuliahan dan penggunaan narkoba
26. Merusak dan atau menghilangkan fasilitas serta alat perlengkapan P2KK

### IV. SANKSI-SANKSI

Pelanggaran terhadap tata tertib akan diberikan sanksi disiplin. Adapun tingkat, jenis dan kategori sanksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tingkat sanksi disiplin terdiri dari:
  - a. Sanksi Disiplin Ringan
  - b. Sanksi Disiplin Sedang
  - c. Sanksi Disiplin Berat
2. Jenis sanksi disiplin ringan terdiri dari:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
3. Jenis sanksi disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penugasan meresume materi atau tugas sejenis disesuaikan dengan tingkat pelanggaran
  - b. Pembuatan makalah dan penandatanganan surat pernyataan pelanggaran
  - c. Pengurangan nilai materi P2KK, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran
4. Jenis sanksi berat terdiri dari:
  - a. Penandatanganan surat pernyataan pelanggaran, dipulangkan dari kegiatan P2KK dan pemanggilan orang tua
  - b. Penandatanganan surat pernyataan pelanggaran, dipulangkan dari kegiatan P2KK dan DINYATAKAN TIDAK LULUS